

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 150 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kami No. 147 tahun 1964 tanggal 10 Juni 1964 tentang Dana Sukarelawan Dwikora, dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Pengurus Dana Sukarelawan Dwikora sebagaimana termaksud dalam pasal 3 Keputusan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 147 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Dana Sukarelawan DWIKORA, yang anggotanya terdiri dari :

I. PENGURUS UMUM :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ketua Umum | - Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata. |
| 2. Wakil Ketua Umum | - Wakil Perdana Menteri. |
| 3. Ketua I/Ketua Harian | - Menteri Koordinator Kompartemen Kesedjahteraan. |
| 4. Ketua II | - Kepala Staf KOTI. |
| 5. Sekretaris | - Sekretaris Menteri Koordinator Kompartemen Kesedjahteraan Urusan Administrasi. |
| 6. Penasehat | - para Menteri. |

II. PENGURUS HARIAN:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Ketua | - Menteri Koordinator Kompartemen Kesedjahteraan H.M. MURJANI DUKIC-MARTONO, |
| 2. Wakil Ketua I | - H. DJAMBEK (Front Nasional). |
| 3. Wakil Ketua II | - R. Busli (Kolonel/P/1). |
| 4. Sekretaris I | - Ramli Thaha S.H. |
| 5. Sekretaris II | - H. Mualliff Nasution. |
| 6. Biro Sekretariat | - A.F. Munir. |
| 7. Biro Keuangan | - P. Siregar. |
| 8. Biro Usaha | - 1. Kol. Sudarto,
2. Let. Kol. Widarto. |

III. STAF PEMBANTU :

1. Kolonel Sutjipto S.H.
2. A.M. Dasaad,
3. Moh. Nahar,
4. Nj. Salawati Daud,
5. H. Hasjim Ning,

6. A. Aslam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

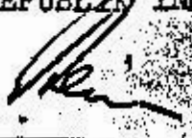
6. A. Aslam,
7. Sabillal Rasjad,
8. Mardanus,
9. Let. Kol. Prajitno,
10. Nj. Walandauw,
11. F.C. Palansuka.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Wakil Perdana Menteri,
3. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
4. Para Menteri,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Wakil Ketua D.P.A.,
8. Bappenas,
9. Dewan Pengawas Keuangan,
10. M.P.P.R.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Juni 1964.
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


J. LEIMENA.